

ABSTRACT

The purpose of this study was to arrange the development recommendation of structural model in Health of East Java Province that based on the proper authority between the government regulation number 25 in year 2000 and the province regulation of East Java number 37 in year 2000.

This study was policy analysis by using the institutional and group approach with doing interview deeply to all structural functionaries in Health Office of East Java Province that amount 25 people; the Head of Organization Office in Province Government of East Java, some resource persons in Health Departement of Indonesia Republic. It was to know their perception toward the proper authority between the government regulation number 25 in year 2000 and the province regulation of East Java number 37 in year 2000.

The first step was to explain about the authority of Health of East Java Province in the government regulation number 25 in year 2000, and grouped the duty and function that had the same kind with the province regulation of East Java number 37 in year 2000.

The next step was to do the interview deeply toward Structural Functionaries. From the interview, it was gotten that each sub-departement run duty and function based on the authority of the government regulation number 25 in year 2000 as well as their area. In running the function, each sub-department had made the description of duty and in the realization there were many overlap duties among the sub-department one and another. From the result of depth interview, it was obtained the opinion that stated the authority II, III and V based on the government regulation number 25 in year 2000 was still necessary to explain.

The conclusion of this study was the structure of Health East Java Province base on the province regulation of East Java number 37 year 2000 had been suitable with the authority of Province Health Departement based on the government regulation number 25 in year 2000. But in the implementation of each duty and function happened the overlap or duplication. It was caused that the different perception in meaning several authorities of government regulation number 25 in year 2000 became the duty and function of sub-department.

From the result of study, it was recommended that structural development in Health of East Java Province was slenderized by combining the similar function or permanent structure with clear management and coordination in sub-department.

Keywords : Structural Model of Health East Java Province, Authority, Government Regulation Number 25 in year 2000, Province Regulation of East Java Number 37 in year 2000.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah menyusun rekomendasi pengembangan model Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur berdasarkan kesesuaian kewenangan antara Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000.

Penelitian ini merupakan analisis kebijakan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dan pendekatan kelompok dengan melakukan wawancara mendalam kepada seluruh Pejabat Struktural di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur berjumlah 25 orang, Kepala Biro Organisasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sejumlah Narasumber di Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengetahui persepsi mereka terhadap kesesuaian kewenangan antara Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000.

Langkah Pertama adalah menjabarkan kewenangan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur didalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, dan mengelompokkan tugas dan fungsi yang sejenis dari Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000.

Langkah Selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam terhadap Pejabat Struktural, dari hasil wawancara didapatkan bahwa masing – masing Sub Dinas menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kewenangan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 sesuai bidangnya masing – masing. Dalam menjalankan fungsi tersebut masing – masing Sub Dinas telah membuat uraian tugas dan pada pelaksanaannya banyak dijumpai tugas – tugas yang tumpah tindih antara Sub Dinas satu dan lainnya. Dari hasil wawancara mendalam didapatkan juga pendapat yang menyatakan bahwa kewenangan II, III dan V berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 masih perlu diberi penjelasan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000 sudah sesuai dengan kewenangan Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000. Tetapi pada penjabaran di dalam tugas dan fungsi masing – masing Sub Dinas terjadi tumpang tindih / duplikasi, hal ini disebabkan persepsi yang berbeda dalam menterjemahkan beberapa kewenangan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 menjadi tugas dan fungsi Sub Dinas.

Dari hasil penelitian direkomendasikan adanya perampingan Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan menggabungkan fungsi yang sejenis atau Struktur tetap, tetapi ada pengaturan dan koordinasi antar Sub Dinas.

Kata kunci : Model Struktur Dinas Kesehatan, Kewenangan, Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000.